

BAB I

PENDAHULUAN

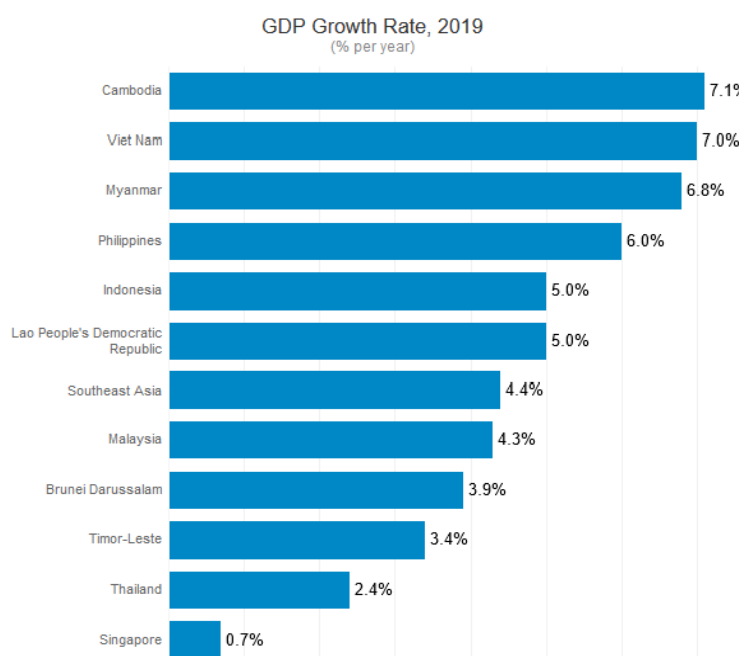
1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga atas dasar tersebut maka setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Seran, 2016:113). Tingginya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi yang ada di suatu negara. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara sebagai akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.

Perekonomian suatu negara dinyatakan mengalami pertumbuhan ketika ada peningkatan terhadap produksi barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah yang berkelanjutan akan memperlihatkan perekonomian yang terdapat di negara tersebut memiliki perkembangan yang baik. Romi dan Umiyati (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sangat berarti untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan cara menciptakan atau memperluas kesempatan kerja. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk menciptakan *trickle down effect* (efek menetes ke bawah) dengan cara tenaga kerja yang terserap di lapangan pekerjaan yang pada akhirnya penduduk akan semakin banyak yang mendapatkan *income* sehingga berkurangnya kemiskinan.

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP yang dimiliki oleh negara tersebut mengalami peningkatan, dan hal tersebut dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi (Huda, 2017:8). Berdasarkan data dari Asian Development Bank dapat diketahui GDP negara Indonesia berada di atas rata-rata GDP negara kawasan asia tenggara.

Gambar 1. GDP Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2019



Sumber: www.adb.org

Gambar 1 menunjukkan GDP *growth rate* negara Indonesia tahun 2019 sebesar 5,0% termasuk lima besar tertinggi di kawasan Asia Tenggara. GDP *growth rate* negara Indonesia berada di atas rata-rata GDP *growth rate* negara-negara Asia Tenggara sebesar 4,4%. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara Laos, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Thailand, dan Singapura.

Pertumbuhan ekonomi memiliki arti sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang berdampak pada produksi barang dan jasa di masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Bawuno, Kalangi, dan Sumual, 2015). Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu negara (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008). Oleh karena itu, perlu diidentifikasi berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan Solow-Swan yang disebut dengan model neoklasik mengasumsikan bahwa peningkatan modal tenaga kerja menciptakan pertumbuhan ekonomi selama masyarakat dapat terus memberikan modal secara produktif. Negara-negara miskin dengan tingkat modal per kapita yang rendah akan tumbuh lebih cepat karena setiap investasi dari modal akan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki modal besar (Huda, 2017:107). Model pertumbuhan Solow-Swan menjelaskan bahwa modal dapat diperoleh melalui investasi. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis modal tradisional seperti pabrik dan mesin-mesin produksi atau jenis modal baru seperti teknologi informasi. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal yang disebut dengan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sistem irigasi, dan lain-lain. Selain itu, juga ada modal manusia

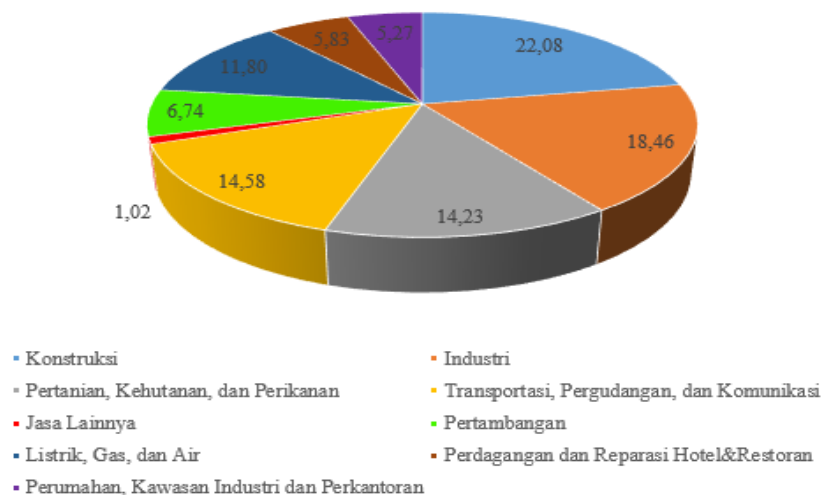
berupa ilmu pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dari pekerja (Mankiw, 2011:222).

Investasi memiliki peran yang penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan munculnya investasi-investasi baru maka memberikan peluang untuk menciptakan modal baru yang pada akhirnya terjadi penyerapan faktor produksi baru seperti terciptanya lapangan kerja atau peluang kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dan berkurangnya pengangguran, sehingga akan menstimuli meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi (seperti pendapatan bunga, *royalty*, deviden, pendapatan sewa dan lain – lain), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pihak pribadi (*natural person*) maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian (Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2011).

Penanaman modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat

2 menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016) menjelaskan penanaman modal asing adalah pemindahan modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain.

Gambar 2. Investasi PMDN Menurut Sektor (Dalam Persen) Tahun 2019



Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui sektor konstruksi paling banyak diminati dalam PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) mencapai 22,08 persen. Sedangkan sektor industri menyerap sebesar 18,46 persen.

Selanjutnya Sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi mampu menyerap investasi domestik sebesar 14,58 persen. Adapun nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) yang terealisasi menurut sub sektor sebagai berikut:

Gambar 3. Investasi PMA Menurut Sektor (Dalam Persen) Tahun 2019



Sumber: BPS (2019)

Jika dilihat secara sektoral, Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut didominasi oleh Sektor Perindustrian (26,04 persen), kemudian diikuti oleh Sektor Transpor, Pergudangan dan Komunikasi serta Sektor Listrik, Gas dan Air masing-masing mempunyai kontribusi sebesar 22,82 persen dan 21,22 persen. Dalam rangka meningkatkan investasi pemerintah melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) memberi kemudahan dan penyederhanaan prosedur bagi kegiatan investasi melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri/Lembaga terkait, berjalan dengan baik yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya menarik investor dalam negeri

maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat ditingkatkan melalui belanja pemerintah. Belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu 1) belanja langsung, yaitu anggaran belanja yang dikeluarkan karena terkait langsung dalam mendukung pelaksanaan suatu program dan kegiatan); 2) belanja tidak langsung, yaitu anggaran belanja yang dikeluarkan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program pemerintah. Belanja pemerintah diarahkan agar lebih efektif dan produktif dalam rangka penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, daya saing, akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Tabel 1. Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi Tahun 2019

No.	Fungsi	Jumlah (dalam triliun rupiah)
1.	Pelayanan umum	517,3
2.	Ekonomi	389,6
3.	Perlindungan sosial	200,8
4.	Pendidikan	152,7
5.	Ketertiban dan keamanan	143,0
6.	Pertahanan	108,4
7.	Kesehatan	62,7
8.	Perumahan dan fasilitas	26,5
9.	Perlindungan lingkungan	17,7
10.	Agama	10,1
11.	Pariwisata	5,3

Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui apabila ditinjau menurut fungsinya, sebagian besar pengeluaran negara digunakan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan sosial. Fungsi pelayanan umum digunakan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah dan pelaksanaan pemilu 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 517,3 triliun atau 32 persen dari total belanja negara. Sementara fungsi ekonomi digunakan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi. Pada APBN 2019 fungsi ekonomi dianggarkan sebesar 24 persen atau Rp 389,6 triliun. Pengeluaran terbesar selanjutnya adalah pada pembiayaan fungsi perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 200,8 triliun atau 12 persen dari total belanja negara. Adapun fungsi perlindungan sosial digunakan untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH (Program Keluarga Harapan), serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri.

Sementara itu, untuk memenuhi percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah menerapkan skema pendanaan kreatif (*creative financing*), yaitu skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dimana penyediaan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha (swasta). Salah satu poin penting dari skema KPBU, selain mendorong swasta untuk ikut membangun infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kualitas APBN/APBD, mengurangi tekanan pengeluaran APBN/ APBD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dari sebuah proyek infrastruktur.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran di setiap fungsi adalah untuk mendukung terlaksananya program-program yang

bertujuan mensejahterakan masyarakat. Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori Klasik Keynes memiliki asumsi bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Azwar, 2016). Belanja yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor perekonomian akan berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap sektor produksi barang dan jasa. Belanja pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi. Alokasi yang dianggarkan untuk program subsidi dapat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2009-2018.” Penelitian ini akan dibatasi pada variabel investasi yang terdiri dari PMDN dan PMA serta belanja pemerintah sebagai faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi. Periode penelitian akan dibatasi pada kurun waktu 2009 sampai 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh PMA berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah PMDN, PMA, dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menganalisa pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk menganalisa pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk menganalisa pengaruh PMDN, PMA, dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat menerapkan ilmu dan teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan, khususnya mengenai pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai pendukung penelitian-penelitian sebelumnya dan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi masyarakat umum, dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.